

## TAHTA EXTENDED FAMILY DALAM BIAS POLITIK KEKERABATAN

Yuliana Windisari<sup>1</sup>, Ida Wahyuliana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Indonesia, [yuliana.windyy@gmail.com](mailto:yuliana.windyy@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Bangkalan, Indonesia, [idawahyuliana@gmail.com](mailto:idawahyuliana@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.13089>

Naskah diterima 25 Desember 2021, Revisi 12 April 2022, Terbit 16 April 2022

---

### Abstrak

Pada saat ini muncul fenomena politik kekerabatan, khususnya terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pelaksanaan politik kekerabatan masih mendapatkan tempat dalam masyarakat, hal ini berkaitan dengan adanya tipe kepemimpinan kharismatik dan juga sosok yang sudah dikenal oleh Publik, meskipun tidak secara keseluruhan kandidat memiliki latar belakang politik kekerabatan berdasarkan garis keturunan akan tetapi tahta politik berdasarkan garis keturunan juga mampu mendongkrak popularitas calon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil kajian ini adalah Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, model politik dinasti yang berhubungan dengan extended family (keluarga besar) merupakan salah satu alternatif untuk menjadi pemenang dalam pertarungan politik dan kekuasaan, karena simbol sebagai kepala daerah masih dianggap sebagai ajang pemimpin yang bergengsi sehingga ada sekelompok orang yang telah memiliki modal sosial. Kesimpulannya adalah Politik kekerabatan digunakan untuk mendapatkan atensi dan juga kepercayaan dari masyarakat. Dan juga pusran kekuasaan tersebut didukung oleh adanya figure politik berdasarkan garis keturunan di masa lampau yang pernah menjadi pemimpin di daerah tersebut. Agar tidak terjadi konflik kepentingan apabila terindikasi ada politik kekerabatan, maka Pemerintah yang menyelenggarakan Pemerintahan harus benar-benar menerapkan AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik).

**Kata Kunci :** *Extended, Family, Politik, Kekerabatan, Pilkada, Pemerintahan*

### ***THE EXTENDED FAMILY THRONE IN KINSHIP POLITICAL BIAS***

#### ***Abstract***

*There is a phenomenon of kinship politics, especially during the election of regional heads (Pilkada). The implementation of kinship politics still has a place in society; this is related to the existence of charismatic leadership types and also figures that are already known by the public; although not overall, candidates have a political background based on bloodlines, political thrones based on lineage are also able to boost the popularity of candidates. The research method used in this research is qualitative by using literature studies. In the 2020 regional head elections, the dynastic political model related to extended families is one of the alternatives to be the winner in the political and power fight because the symbol as the regional head is still considered a prestigious leadership event so that there is a group of people who already have social capital. The conclusion is that kinship politics are used to gain the community's attention and trust.*

---

*And also, the vortex of power is supported by the existence of political figures based on lineages in the past who have been leaders in the area. To not have a conflict of interest, if there is a politics of kinship, the Government that organizes the Government must implement AAUPB (general principles of good governance).*

**Keywords:** *Extended Family, Kinship Politics, Elections, Government.*

---

© Authors; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan salah satu unsur terpenting dalam demokrasi oleh karena itulah pilkada yang berlangsung sebagai ajang pesta demokrasi yang diselenggarakan pemerintah untuk menciptakan mekanisme *check and balance* dalam kerangka sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah memiliki nilai fungsional tersendiri khususnya untuk menciptakan stabilitas dalam pemerintahan. Isu mengenai pemilihan kepala daerah mulai dari mekanisme, hasil pemilihan hingga calon kepala daerah juga menjadi sorotan publik hal ini juga didukung dengan adanya isu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan walikota di tengah pandemi covid-19. Tentunya hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat disamping keterbatasan pelaksanaan pilkada yang harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat juga berkaitan dengan efektivitas pemilihan umum di tengah pandemi covid-19.

Berdasarkan realitas tersebut diketahui bahwa pemilihan kepala daerah memiliki dua sisi yang saling berkaitan yaitu pro dan kontra jika ditinjau dari mekanisme dan pelaksanaannya. Jika ditinjau dari calon kepala daerah juga menimbulkan terdapat asumsi bahwa tahta politik pada pemilihan kepala daerah juga masih bersinggungan dengan praktik sosial politik kekerabatan. Diketahui bahwa politik kekerabatan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang kekuasaan yang terbagi tetapi dalam ruang lingkup yang terbatas khususnya kekuasaan yang terpusat dalam ikatan kekeluargaan dan garis keturunan.

Pembahasan tentang politik kekerabatan juga terjadi dalam ranah politik lokal atau daerah tidak hanya terdapat pada sistem pemerintahan yang terpusat, hasil kajian tentang dinasti politik pada pemerintahan di tingkat lokal membahas tentang fenomena politik yang melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik, pembahasan pada kajian tersebut adalah sistem elektoral yang terjadi pada tingkat lokal melalui aktor politisi yang membangun dinasti politik di Kepulauan Riau dimana keluarga menjadi politisi pada pemilihan umum tahun 2019.<sup>1</sup> Hasil kajian tersebut menggunakan metode *library research* dengan menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada dan memahami peristiwa secara kronologis serta menganalisisnya menggunakan sudut pandang teori tertentu.

---

<sup>1</sup> Dewi Anggariani, ‘Politik Kekerabatan’, *Jurnal Politik Profetik*, 2.2 (2013), 1–8  
<<http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/view/954>>.

Hasil kajian tentang dinasti politik pada pemerintahan di tingkat politik lokal terdapat beberapa hasil pembahasan yang berkaitan yaitu fenomena dinasti politik di tingkat lokal yang erat dengan konsep family dan menempatkan ikatan kekerabatan pada tingkatan yang tinggi hal ini yang melanggengkan adanya dinasti politik berbasis pada ikatan kekeluargaan. Berdasarkan pada sudut pandang lord acton tentang “*power tends to corrupt*” and “*absolute power corrupts absolutely*” sehingga memunculkan adanya elite pada tingkat lokal yang berdasarkan pada garis keturunan dan keluarga sehingga nilai demokrasi tidak bisa berjalan pada tingkat politik lokal yang akan berdampak pada sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan dan kebijakan publik.<sup>2</sup>

Berdasarkan tinjauan tentang fenomena politik kekerabatan yang ada di Indonesia diketahui bahwa nilai kekeluargaan di Indonesia masih memiliki keterkaitan erat dan terbawa hingga sistem pemerintahan. Sebenarnya fenomena ini bukan hal yang baru melainkan sebuah fenomena yang sudah terjadi di Indonesia sejak adanya kolonialisme dan berkembang hingga saat ini. Aspek sejarah tentang politik kekerabatan di Indonesia bukan hanya berhubungan dengan bagaimana kekuasaan berputar pada arus kekuasaan tertentu dan dominasi golongan tertentu tetapi politik kekerabatan ini juga menjadi alasan dari permasalahan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia pada saat rezim orde baru yang hingga saat ini nilai-nilai tersebut masih eksis. Politik kekerabatan merupakan salah satu alasan mengapa sistem pemerintahan seringkali masih menunjukkan kedekatan terhadap pemilik kekuasaan tertentu. Dinasti politik kekerabatan yang ada di Indonesia merupakan rangkaian sejarah panjang yang hingga saat ini merupakan realitas yang tumbuh di masyarakat Indonesia.

Hasil kajian yang berjudul tentang kampanye dan pertarungan politik di Jawa menjelang pemilihan umum tahun 1955, metode penelitian pada kajian tersebut menggunakan penelitian historis menggunakan peraturan-peraturan pada rentang tahun 1950-1955 serta menggunakan surat kabar yang mengulas tentang pemilihan umum pada tahun 1955. Pada ranah hasil dan pembahasan diketahui terdapat temuan yang mendukung tentang struktur sosial masyarakat Jawa yang masih menganut sistem kekerabatan berdasarkan prinsip bilateral dimana sistem tersebut terbentuk dari gotong royong dalam sistem kekeluargaan yang luas sehingga hubungan kekerabatan yang bersifat tradisional memiliki makna interpersonal yang cukup luas.<sup>3</sup> Sistem kekerabatan ini juga memiliki implikasi pada adanya golongan dan kelas sosial yaitu golongan priyayi dan wong cilik. Kondisi struktur sosial masyarakat yang demikian menjadi salah satu peluang politik pada tahun 1955 khususnya partai politik dengan aliran nasionalisme dan keagamaan, dukungan politik aliran tersebut pada akhirnya yang menjadi salah satu faktor yang memperkuat politik kekerabatan yang berasal dari golongan kekerabatan dengan hubungan interpersonal yang luas.

Hasil kajian tentang refleksi kritis pembangunan budaya pada era orde baru dan reformasi juga membahas tentang adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang berjalan saat pemerintahan orde baru berlangsung. Pada era tersebut juga terdapat fenomena golongan tertentu yang menjadi penguasa di Indonesia dan dengan didukung

---

<sup>2</sup> David Hudson and others, ‘Leadership, Identity and Performance: The Nature and Effect of “Prototypicality” in Indonesia’, *Politics and Governance*, 8.4 (2020), 201–13 <<https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3553>>.

<sup>3</sup> Fitriyah Fitriyah, ‘POLITIK DINASTI PADA KANDIDASI PEREMPUAN DALAM PILKADA SERENTAK 2015 DI JAWA TENGAH’, *JURNAL ILMU SOSIAL*, 17.1 (2018), 39 <<https://doi.org/10.14710/jis.17.1.2018.39-52>>.

oleh para simpatisan atau keluarga besar tradisional sehingga politik kekerabatan tidak hanya berlangsung dalam sistem pemerintahan, tetapi juga terjadi pada bidang strategis tertentu.<sup>4</sup> Politik kekerabatan khususnya tidak hanya berpusat pada *opportunity* berdasarkan kekuasaan saja melainkan penguasaan bidang strategis tertentu oleh golongan dan sistem kekerabatan yang tidak berdasarkan fit dan proper dan kualifikasi tertentu.

Berdasarkan perspektif historis tentang politik kekerabatan, fenomena ini tidak akan pernah lepas dari adanya eksistensi KKN di era orde baru seperti hasil kajian tentang Neo-KKN dan tantangan demokrasi Indonesia, yang menjelaskan tentang relasi antara korupsi dan KKN dimana fenomena tersebut hadir karena adanya pergantian sistem tata kelola pemerintahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Berdasarkan hasil kajian tersebut diketahui bahwa desentralisasi, demokratisasi, dan pembajakan demokrasi merupakan sebuah fenomena terselubung dari adanya indikasi timbulnya praktik kolusi dan nepotisme pada sistem pemerintahan yang dikenal dengan “dinasti politik” atau “praktik oligarki” yang berbasis partai politik sehingga berimbas pada adanya struktur pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok orang atau golongan tertentu yang memiliki akses kekuasaan.

Hal ini tercermin dari proses pilkada yang ada di daerah atau kabupaten dimana calon bupati memiliki relasi kekuasaan dan kekerabatan dengan penguasa pada sistem pemerintahan sehingga menimbulkan opini bahwa kekuasaan terpusat dalam spektrum yang terbatas dan refleksi atas fenomena tersebut disebut dengan politik dinasti. Politik dinasti juga didukung oleh partai politik dengan basis pendukung tertentu misalnya berbasis pada nilai agama dan nasionalisme sehingga kontekstualisasi politik dinasti cukup luas tidak hanya terbatas pada garis keturunan dan kekerabatan dalam keluarga besar.

Praktik kolusi dan nepotisme ini mengalami transformasi dan dikemas dalam mekanisme praktik demokrasi prosedural sehingga kekuasaan pada sistem pemerintahan hanya terpusat pada sekelompok orang tertentu yang bersinggungan dengan garis keturunan penguasa. Fenomena tersebut seringkali dijumpai saat pemilihan kepala daerah yang menyebabkan munculnya elite lokal dan sistem representasi sesuai definisi demokrasi tidak memenuhi aspek keterwakilan disamping biaya politik yang cukup mahal dalam melangsungkan kampanye. Politik kekerabatan yang melahirkan kelompok kekuasaan dan elite lokal memang telah memiliki modal sosial seperti jaringan politik, popularitas, dan dukungan partai politik sehingga demokrasi yang demikian hanya menjadi sebuah nilai demokrasi prosedural karena secara substansial aktor politik telah memiliki plotting berdasarkan relasi kekuasaan dan mendapatkan dukungan dari politik kekerabatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini hendak mengkaji mengenai dampak dari politik kekerabatan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini penting untuk diteliti mengingat potensi *conflict of interest* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Hasil kajian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai politik kekerabatan

---

<sup>4</sup> Pawennari Hijang and Lia Amelia, ‘Assajingeng: Politik Kekerabatan Di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik)’, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6.2 (2019), 121 <<https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.161>>.

dan arah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pembahasan yang bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan suatu permasalahan, peristiwa, keadaan, dan fakta yang terjadi. Pada kajian tentang tahta *extended family* dalam bias politik kekerabatan memberikan gambaran dan interpretasi tentang latar belakang fenomena politik kekerabatan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah sehingga fenomena ini dijelaskan berdasarkan aspek historis didukung oleh penelitian terdahulu, uraian tentang politik kekerabatan, tinjauan dari sudut pandang demokrasi, eksistensi *extended family* (keluarga besar) dan sudut pandang dari perspektif hukum.

Tinjauan tentang politik kekerabatan menggunakan studi kepustakaan dalam membahas tentang politik kekerabatan secara lebih mendalam dan obyektif baik dalam aktualitas permasalahan yang dibahas, studi kasus tentang politik kekerabatan dan pengetahuan tentang politik kekerabatan jika ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, dengan menggunakan studi pustaka pada kajian tentang tahta *extended family* dalam bias politik kekerabatan dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas berdasarkan aspek sosiologis bagaimana masyarakat memiliki preferensi dan orientasi tertentu dalam pemilihan calon pasangan calon bupati atau wali kota khususnya mereka yang telah dikenal masyarakat karena berasal dari kalangan keluarga yang sebelumnya pernah memiliki *track record* sebagai pemimpin di tingkat lokal. Selain itu, untuk menjelaskan fenomena secara obyektif, politik kekerabatan juga ditinjau dari sudut pandang tata perundang-undangan yang berkaitan dengan *good governance*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang politik kekerabatan dalam keterwakilan perempuan pada rekrutmen politik partai Nasdem pada pemilihan umum (PEMILU) 2019 menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan pada pemilihan umum (PEMILU) serentak tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor kekerabatan.<sup>5</sup> Faktor kekerabatan ini terjadi karena perempuan yang terlibat dalam partai Nasdem telah memiliki citra politik di mata publik, keterlibatan perempuan yang didukung oleh faktor kekerabatan karena calon tersebut merupakan istri, anak atau keluarga dari pejabat publik yang sebelumnya telah dikenal oleh publik. Oleh karena itu, partai politik Nasdem adalah kendaraan untuk memperkuat posisi perempuan di mata publik. Akses dan sumber daya inilah yang membuat perempuan memiliki dukungan untuk memperoleh suara dan atensi dari publik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa politik kekerabatan masih mendapatkan tempat dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya tipe kepemimpinan kharismatik dan juga sosok yang sudah dikenal oleh publik, meskipun tidak secara keseluruhan kandidat memiliki latar belakang politik kekerabatan berdasarkan garis

---

<sup>5</sup> Siti Zaetun and Chusnul Mar'iyah, 'Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019', *The Journalish: Social and Government*, 1.3 (2020), 119–29 <<https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.58>>.

keturunan akan tetapi tahta politik berdasarkan garis keturunan juga memiliki sisi fungsional yang mampu mendongkrak popularitas calon.

Dalam penelitian yang berjudul *Leadership, Identity and Performance: The Nature and Effect of 'Prototypicality' in Indonesia*, penelitian yang dilakukan pada 5 (lima) provinsi yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pada lima provinsi tersebut terdapat variasi etnis dan dialek atau bahasa daerah dengan karakteristik Sumatera Utara sebagian besar penduduknya beragama Kristen, Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki hubungan politik, sosial, dan ekonomi yang penting dan merepresentasikan variasi etnis di Indonesia. Sedangkan Jawa Barat merupakan tempat tinggal bagi etnis sunda dan pusat aktivitas bisnis serta ekonomi dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam kemudian untuk Provinsi Jawa Timur mayoritas adalah etnis Jawa dan tempat tinggal untuk organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul ulama dan yang terakhir adalah Sulawesi Selatan yang ranah politiknya didominasi oleh politik dinasti berbasis kekerabatan dan garis keturunan dan kekuatan keagamaan yang kuat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan identitas primer berdasarkan agama dan etnis sedangkan yang kedua baru mempertimbangkan performance.<sup>6</sup>

Hasil kajian tentang Politik Dinasti pada kandidasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 di Jawa Tengah menjelaskan bahwa terdapat indikasi peluang calon pemimpin perempuan yang berasal dari istri atau puteri mantan kepala daerah atau elite politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik yang dilakukan oleh sekelompok elite menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan berada dalam lingkup politik yang berbasis pada nilai kekerabatan, dinasti politik yang melibatkan perempuan karena adanya ikatan kekeluargaan menunjukkan bahwa ini adalah strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan, dan pilkada serentak khususnya dalam ranah pemerintahan lokal yang melibatkan perempuan sebagai kandidat menunjukkan bahwa kekuasaan masih terpusat ada elite lokal tertentu sehingga perempuan yang memiliki hubungan keluarga dianggap representasi untuk melanjutkan kekuasaan.<sup>7</sup>

Pada kajian tentang politik kekerabatan jika ditinjau dari aspek antropologi dan tradisi politik hal ini berkaitan dengan pola kekerabatan yang bersifat komunitas atau terbatas pada keluarga tertentu hal ini didukung dengan adanya tinjauan tentang keluarga dan politik yang bersifat kolektivitas sehingga pemimpin politik dianggap hal yang wajar jika mampu merepresentasikan kelompok sosialnya. Politik kekerabatan memang identik dengan masyarakat pedesaan yang memiliki lingkup interaksi yang lebih terbatas dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, tetapi pada realitasnya politik kekerabatan juga berlangsung dalam sistem pemerintahan yang memiliki dasar hukum didalamnya, hubungan kekerabatan dalam mekanisme politik juga memiliki andil yang cukup besar sama seperti persamaan identitas ideologi dan agama. Dalam sistem kekerabatan juga bertautan dengan politik segmenter yang menjelaskan bahwa kelompok lokal dapat menjadi kesatuan karena memiliki ikatan darah dan persaudaraan yang pada akhirnya berimbas pada hubungan sosial dan politik dan melanggengkan kekuasaan tertentu karena adanya akses terhadap sumber daya dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian tersebut diketahui bahwa politik dinasti

---

<sup>6</sup> Hudson and others.

<sup>7</sup> Fitriyah.

merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan bukan sebuah hal yang baru, politik dinasti memiliki keterkaitan dengan perubahan sosial pada masyarakat hal ini karena figur atau sosok pemimpin merupakan simbol dari mekanisme pemerintahan. Berdasarkan realitas tersebut, maka sistem kekerabatan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan masih terjadi di Indonesia.

Politik kekerabatan jika ditinjau dari nilai politik merupakan bagian dari kekuasaan elite yang berpusat pada kelompok atau golongan tertentu yang menguasai sumber daya, berdasarkan fenomena tersebut maka politik kekerabatan merupakan sebuah tradisi yang masih melekat pada masyarakat Indonesia khususnya.<sup>8</sup> Hal ini berkaitan pula dengan struktur sosial dalam keluarga, dimana struktur sosial ini adalah sebuah hubungan yang bersifat timbal balik yang didalamnya berkaitan dengan peran dan status, golongan atau kelompok yang memiliki status sosial “terpandang” di masyarakat secara langsung dianggap penguasaan sumber daya tertentu. Begitupun dengan politik kekerabatan, dalam struktur sosial keluarga politik kekerabatan merupakan mekanisme dalam mempertahankan akses dan sumber daya khususnya berkaitan dengan jabatan dan posisi strategis tertentu untuk mempertahankan tahta pada status keluarga tersebut.

Keluarga merupakan kelompok primer yang ada pada masyarakat, hubungan dalam keluarga merupakan relasi yang bersifat khas karena memiliki ikatan sosial dan ikatan darah dalam keberlangsungannya, keluarga sebagai lembaga sosial dalam masyarakat juga memiliki hubungan hirarkis dan hubungan antar generasi sehingga makna keluarga memiliki kontekstualisasi yang cukup luas. Pada pembahasan tentang politik kekerabatan, keluarga memiliki urgensi dalam melanggengkan kekuasaan karena seorang individu akan mengalami proses belajar atau sosialisasi primer dari keluarga sehingga nilai-nilai politik, orientasi politik merupakan proses belajar yang disosialisasikan dalam hubungan antar generasi.

Peran sosial dalam keluarga yang didapatkan melalui tiga mekanisme yaitu peran sosial yang diterima (*ascribed status*) dan peran sosial yang dicapai melalui perjuangan (*achieved status*). Berdasarkan konsep tersebut politik kekerabatan merupakan bagian dari peran sosial seorang individu yang diperoleh melalui *ascribed status* atau peran yang melekat, dan peran ini merupakan salah satu modal sosial utama calon bupati serta wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah karena mereka telah memiliki jejaring sosial, relasi kuasa dengan pihak yang memiliki kekuasaan pada sistem pemerintahan dan hal ini tentunya berperan dalam elektabilitas calon pasangan, *ascribed status* ini tentunya melekat pada kandidat pasangan bupati dan wakil bupati yang terlibat dalam pertarungan politik. Proses labelling karena adanya kepercayaan yang telah dibangun oleh masyarakat terhadap keluarga tersebut misalnya anak dari mantan bupati atau pejabat daerah akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat setempat karena popularitas yang telah dimiliki oleh generasi sebelumnya. Hal ini berlangsung dalam struktur kekerabatan dan hubungan antar generasi.

Peran sosial dalam sudut pandang *achieved status* juga menjadi salah satu faktor penentu yang penting karena dalam relasi dan interaksi sosial masyarakat, calon pasangan bupati dan wakil bupati tidak hanya memiliki modal sosial dan popularitas keluarga besar melainkan ada proses untuk mencapai jabatan tertentu dan proses tersebut bersifat aktif serta dinamis sehingga politik kekerabatan pada institusi keluarga

---

<sup>8</sup> Adelia Fitri, ‘Dinasti Politik Pada Pemerintahan Di Tingkat Lokal’, *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4.1 (2019), 91–111 <<https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>>.

---

merupakan langkah awal dan modal sosial untuk mencapai posisi tertentu dan melanggengkan kekuasaan melalui garis keturunan keluarga.

Berdasarkan perspektif sosiologi keluarga hubungan kekerabatan memiliki berbagai bentuk khususnya yang ada di Indonesia yang memiliki relevansi dengan adanya politik kekerabatan yang eksistensinya masih ada, tinjauan tentang politik kekerabatan juga berkaitan erat dengan struktur sosial dalam keluarga dan hal tersebut merupakan hubungan timbal balik serta bagian dari interaksi sosial dalam keluarga terutama berkaitan dengan “peran dan status”. Eksistensi politik kekerabatan bisa tumbuh karena adanya dukungan keluarga. Khususnya keluarga yang sejatinya telah memiliki “nama baik” di masyarakat sehingga tahta politik kekerabatan juga bisa berlangsung karena adanya trust kepada golongan tertentu yang telah menjadi role model dalam menjalankan pemerintahan.

Struktur keluarga yang memiliki signifikansi dalam politik kekerabatan adalah keluarga luas (*extended family*) yaitu bentuk keluarga dengan kekerabatan yang berasal dari keluarga inti, hubungan sosial dalam keluarga besar merupakan sebuah kesatuan khususnya dalam masyarakat tradisional atau pedesaan. Peran keluarga besar adalah saling membantu khususnya dalam sosial ekonomi dan jaringan dalam keluarga besar merupakan hubungan antar generasi, dalam masyarakat Jawa ini dikenal dengan trah atau generasi penerus.

Beberapa hal yang menarik dalam hubungan sosial keluarga besar adalah jaringan sosial khususnya untuk saling membantu anggota keluarganya. Hal ini tidak hanya dijumpai dalam keluarga pada etnis Jawa tetapi juga pada beberapa etnis lain seperti etnis arab yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan anggota keluarga lain khususnya pada hubungan dan jaringan perdagangan komoditi barang dan jasa tertentu. Konsep tentang keluarga besar ini juga menjadi jaringan sosial dalam konteks politik khususnya ajang pemilihan umum karena adanya trah atau generasi penerus yang akan menjadi kandidat dalam pertarungan politik sehingga hal ini menjadi sebuah modal sosial untuk melanggengkan tahta kekuasaan politik kekerabatan.

Pada struktur keluarga juga terdapat penjelasan mengenai politik kekerabatan yang pola kepemimpinannya berdasarkan pada kekuasaan secara turun-temurun sehingga pemimpin merupakan generasi penerus yang memiliki garis keturunan secara langsung dari pemimpin sebelumnya dan hal ini berkaitan dengan gelar bangsawan yang dimiliki untuk memimpin wilayah atau daerah tertentu.<sup>9</sup> Tentunya, hal ini terjadi pada pola kepemimpinan di masa lampau atau untuk wilayah tertentu yang memiliki keistimewaan sedangkan pola kepemimpinan berdasarkan keturunan tidak bisa menjadi representasi dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki asas demokrasi dimana pemimpin merupakan representasi dari rakyat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengatur masyarakatnya dalam sebuah sistem pemerintahan yang ideal dan berdasarkan nilai meritokrasi.

Representasi keluarga dalam politik kekerabatan menjadi sebuah bayangan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan tanpa melibatkan kepentingan pribadi untuk kepentingan publik, tetapi faktanya keluarga dalam tahta politik kekerabatan menjadi sebuah modal sosial untuk membangun kekuasaan secara lebih luas dan menjadi sebuah sumber daya untuk membangun jaringan pada sistem pemerintahan yang seharusnya menjadi simbol representasi dari kepentingan masyarakat luas bukan sebagian golongan

---

<sup>9</sup> Anggariani.

yang berkepentingan. Politik kekerabatan yang didukung oleh adanya *extended family* merupakan sebuah polemik karena adanya penguasaan akses yang terpusat pada elite tertentu untuk menjadi calon pemimpin khususnya kepala daerah atau wakil kepala daerah. Masyarakat Indonesia yang masih menganut sistem kekeluargaan dengan struktur *extended family* juga dilematis dalam menentukan calon pemimpin ideal yang mengacu pada konsep demokrasi.

Penjelasan tentang idealisme demokrasi merupakan sebuah bagian dalam penerapan penyelenggaraan politik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat karena hakikatnya demokrasi adalah sebuah sistem yang menitikberatkan pada kepentingan rakyat dengan unsur representatif yaitu pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya nilai idealisme demokrasi menjadi referensi utama dalam pemilihan umum khususnya pemilihan umum untuk kepala daerah (pemilukada). Pasang surut implementasi demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi nilai demokrasi bukan hal yang mudah terlebih nilai demokrasi.

Orientasi politik yang menekankan pada aspek seperti kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik memiliki keterkaitan satu dengan lainnya oleh karena itu sebagai sebuah sistem politik sudah seharusnya demokrasi memiliki unsur tersebut agar idealismenya tidak tergantikan oleh keberadaan nilai yang berdasar pada kepentingan elite politik tertentu dan kekuasaan terhadap sumber daya. Kebijakan dalam sistem politik menunjukkan adanya hubungan dialogis antara pemimpin dan rakyatnya dan hal tersebut akan bisa tercapai apabila setiap warga negara mampu menyalurkan aspirasi politiknya melalui wadah pemilihan umum yang diselenggarakan untuk menciptakan stabilitas sistem politik yang mewujudkan idealisme demokrasi.

Penerapan idealisme demokrasi memberikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, prinsip demokrasi tidak hanya terbatas pada ruang lingkup mekanisme politik tetapi juga menciptakan stabilitas melalui sistem ekonomi dan sosial dan mengatur rakyat melalui kebijakan yang berbasis pada kepentingan rakyat. Idealisme demokrasi salah satunya adalah menekankan pada dimensi keterwakilan, oleh karena itu sistem yang representative terhadap nilai keterwakilan harus dilaksanakan untuk menjamin hak unsur mayoritas dan minoritas.

Fenomena *extended family* dalam politik kekerabatan adalah sebuah realitas yang menunjukkan bahwa unsur lokalitas masih ada dan seringkali bertentangan dengan prinsip dasar dari demokrasi akan tetapi hal tersebut merupakan fakta yang terjadi khususnya penguasaan sumberdaya dan akses terhadap jabatan politik tertentu.<sup>10</sup> Jika dikaitkan dengan unsur kekerabatan di Indonesia yang masih kental. Hal ini tidak akan pernah lepas dari perspektif antropologis yang menjelaskan bagaimana masyarakat itu adalah sebuah ikatan yang eksistensinya ada serta terbagi menjadi beberapa diferensiasi, masyarakat Indonesia yang terdiri dari suatu kelompok atas ikatan marga, suku bahkan kedekatan tempat tinggal akan merujuk pada sebuah identitas dan pada akhirnya terbangunnya rasa solidaritas dalam kelompok tertentu.

Istilah kampanye politik dengan menyebutkan identitas putera daerah, putera asli kota tertentu semakin menguatkan eksistensi politik kekerabatan karena memperkuat adanya ikatan rakyat dan calon pemimpin di wilayahnya meskipun seringkali fenomena tersebut justru dimanfaatkan oleh sekelompok elite pemimpin yang memiliki kekuasaan,

---

<sup>10</sup> Titin Purwaningsih, 'Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan', *Jurnal Politik*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>>.

sumberdaya, dan relasi untuk memperkuat tahta *extended family* dalam sistem pemerintahan dan hal ini tentunya bertentangan dengan idealisme demokrasi yang mengedepankan asas representasi dan pemilihan umum yang bersifat objektif. Hanya saja, kita tidak bisa memungkiri adanya fenomena tersebut bahwa ada hegemoni kekuasaan yang berdasarkan pada prinsip identitas sosial yang melekat pada masyarakat, identitas yang berhubungan simbol-simbol representasi dan keterwakilan karena berasal dari kelompok sosial yang sama bahkan hubungan kekerabatan dalam fenomena politik dinasti ini tidak hanya berlangsung dalam keluarga inti, tetapi melibatkan *extended family* yang telah memiliki modal sosial di masyarakat.

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, model politik dinasti yang berhubungan dengan *extended family* (keluarga besar) merupakan salah satu alternatif untuk menjadi pemenang dalam pertarungan politik dan kekuasaan karena simbol sebagai kepala daerah masih dianggap sebagai ajang pemimpin yang bergengsi sehingga ada sekelompok orang yang telah memiliki modal sosial, dinamika yang demikian juga menjadi hal yang penting untuk menjadi perhatian saat membicarakan tentang idealisme demokrasi agar perspektif politik kekerabatan dapat dijelaskan secara lebih mendalam bukan hanya berdasarkan pada perilaku politik dan kerangka nepotisme tetapi bagaimana politik kekerabatan ini juga mengusung nilai identitas sosial dalam kelompok tertentu. Salah satu contoh adalah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur terdapat pasangan calon bupati yang sudah berada pada pusaran kekuasaan sehingga untuk mendapatkan atensi dan juga kepercayaan dari masyarakat tentunya akan lebih mudah, terlebih lagi pada pusaran kekuasaan tersebut didukung oleh adanya figur politik berdasarkan garis keturunan di masa lampau yang pernah menjadi pemimpin di kabupaten tersebut tentunya hal ini akan mempengaruhi elektabilitas calon pasangan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas. kualitas pelayanan itu sendiri ditentukan oleh kompetensi penyelenggaranya. Ia harus bertindak profesional, tidak diskriminasi, penuh integritas, dan bebas dari KKN. Setidaknya, beberapa prinsip tadi yang harus dipegang oleh pemberi layanan. Untuk memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menuju good governance, maka pemerintah dalam menjalankan Pemerintahan harus berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Asas-asas umum Pemerintahan yang baik diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam UU AS berisi yaitu: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.<sup>11</sup>

Pertama, Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum. Asas yang kedua adalah kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang untuk setiap lapisan masyarakat. Ketiga adalah asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan pemerintah dalam menetapkan keputusan atau tindakan harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak melakukan tindakan diskriminatif. Keempat adalah asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas

---

<sup>11</sup> Muhamad Azhar and M LI, 'Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara', *Notarius*, 8.2 (2015), 274-286-286.

penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Kelima adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai, tidak menyalahgunakan dan mencampur adukkan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Keenam adalah asas keterbukaan, adalah asas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketujuh adalah asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Terakhir adalah asas pelayanan yang baik, asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Jadi dari penjelasan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk menuju pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus mengimplementasikan asas-asas diatas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu asas yang menarik untuk dibahas adalah ketidakberpihakan dimana pemerintah harus netral dan tidak boleh memihak salah satu pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam politik kekerabatan yang sudah dijelaskan diatas, sangatlah rawan bagi penyelenggara negara karena ditakutkan hanya memperhatikan kepentingan dari kerabat atau golongannya saja.

Selain itu, dikhawatirkan politik kekerabatan ini, akan tercipta *conflict of interest* (konflik kepentingan) sehingga dapat mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan negara.<sup>13</sup> Konflik kepentingan bentuknya diantaranya adalah memiliki hubungan keluarga dengan orang yang dilayani, rangkap jabatan, menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi, membocorkan rahasia jabatan, memberikan akses khusus kepada orang lain tanpa prosedur, dan menyalahgunakan kewenangan.

Dalam hal ini, politik kekerabatan identik dan rawan dengan bentuk maladministrasi yaitu memiliki hubungan keluarga dengan orang yang dilayani atau diawasinya dimana seharusnya penyelenggara negara bisa bertindak profesional dan memberikan pelayanan sesuai prosedur, namun karena ada hubungan keluarga atau kekerabatan berpotensi melanggar etika dan menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan. Akibatnya, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan tidak bisa maksimal.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, contohnya adalah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur terdapat pasangan calon bupati yang didukung oleh adanya figur politik berdasarkan garis keturunan di masa lampau yang pernah menjadi pemimpin di kabupaten tersebut.<sup>14</sup> Dampak positifnya adalah masyarakat bisa sedikit memahami gaya kepemimpinan dari Kepala daerah tersebut dari gaya kepemimpinan sebelumnya. Dampak negatifnya adalah dikhawatirkan ada campur tangan dari kepala daerah sebelumnya yang masih ada hubungan kerabat sehingga tidak tercipta *good governance* di daerah tersebut. Hal ini bisa dicegah dengan

---

<sup>12</sup> Azhar and LI, p. 281.

<sup>13</sup> Catur Puguh Pamungkas, 'Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015', *Journal of Politic and Government Studies*, 7.3 (2018), 221–30.

<sup>14</sup> Fitri.

memaksimalkan dan mengoptimalkan pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dari masyarakat setempat sehingga dampak negatif dari politik kekerabatan tidak terjadi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

## SIMPULAN

Pada hakikatnya politik yang berdasarkan atas kekerabatan merupakan bagian dari fenomena yang terjadi pada masyarakat khususnya dalam ranah penentuan calon pemimpin daerah atau wilayah, dukungan tersebut diperkuat dengan adanya *extended family* yang menjadi golongan atau kelompok yang turut melanggengkan kekuasaan, hal ini tentunya bertentangan dengan hakikat dan prinsip dari demokrasi. Berdasarkan perspektif hukum, politik kekerabatan bertentangan dengan asas-asas umum untuk menjalankan pemerintahan yang baik karena pada prinsipnya politik kekerabatan merupakan sebuah nilai yang tidak berdasarkan pada nilai profesionalitas, mengingat pemerintah merupakan simbol yang menjadi unsur representasi dari negara yang seharusnya memberikan teladan yang baik untuk rakyatnya.

Tinjauan tentang politik kekerabatan ini menjadi salah satu refleksi tentang implementasi dan idealisme dari penerapan demokrasi karena masih adanya nilai lokalitas dalam pemilihan calon pemimpin yang masih mempertimbangkan tentang garis keturunan atau kekeluargaan, sebenarnya fenomena ini tidak pernah terlepas dari *culture* akan eksistensi *extended family* yang saling memperkuat ikatan sosial dan adanya kekuasaan sumberdaya atau akses oleh sekelompok elite atau keluarga tertentu. Hal ini tentunya bertentangan dengan idealisme demokrasi yang sejatinya mengajak masyarakat dan pemimpin untuk menciptakan hubungan yang bersifat dialogis. Pada pemilihan kepala daerah, tentunya calon pasangan bupati atau wali kota memiliki daya tarik tersendiri, tetapi yang perlu diketahui adalah calon pasangan yang sudah berada di pusaran elite memiliki modal sosial berupa relasi serta didukung oleh pengetahuan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Berdasarkan sudut pandang hukum, politik kekerabatan merupakan salah satu bentuk kerawanan terhadap pelaksanaan dari sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip *good governance* karena rawan terhadap konflik kepentingan dan juga penyimpangan lainnya baik itu perilaku koruptif dan nepotisme maupun tindakan yang mengarah pada *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) sehingga kesadaran akan pentingnya demokrasi sangatlah penting disamping itu pengawasan secara eksternal oleh ombudsman disini sangat diperlukan dimana ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan sebagaimana di atur dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggariani, Dewi, 'Politik Kekerabatan', *Jurnal Politik Profetik*, 2.2 (2013), 1–8  
<<http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/view/954>>
- Azhar, Muhamad, and M LI, 'Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara', *Notarius*, 8.2 (2015), 274-286–286
- Fitri, Adelia, 'Dinasti Politik Pada Pemerintahan Di Tingkat Lokal', *KEMUDI : Jurnal*

- 
- Ilmu Pemerintahan*, 4.1 (2019), 91–111  
<<https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>>
- Fitriyah, Fitriyah, ‘POLITIK DINASTI PADA KANDIDASI PEREMPUAN DALAM PILKADA SERENTAK 2015 DI JAWA TENGAH’, *JURNAL ILMU SOSIAL*, 17.1 (2018), 39 <<https://doi.org/10.14710/jis.17.1.2018.39-52>>
- Hijjang, Pawennari, and Lia Amelia, ‘Assajingeng: Politik Kekerabatan Di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik)’, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6.2 (2019), 121 <<https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.161>>
- Hudson, David, Claire Mcloughlin, Anna Margret, and Yolanda Pandjaitan, ‘Leadership, Identity and Performance: The Nature and Effect of “Prototypicality” in Indonesia’, *Politics and Governance*, 8.4 (2020), 201–13 <<https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3553>>
- Pamungkas, Catur Puguh, ‘Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015’, *Journal of Politic and Government Studies*, 7.3 (2018), 221–30
- Purwaningsih, Titin, ‘Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan’, *Jurnal Politik*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10>>
- Siti Zaetun, and Chusnul Mar’iyah, ‘Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019’, *TheJournalish: Social and Government*, 1.3 (2020), 119–29 <<https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.58>>